

BPK AUDIT PROYEK DKK SRAGEN

SRAGEN - Pembangunan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen mendapatkan perhantian sejumlah lembaga pengawasan. Apalagi pengerjaan proyek senilai Rp 7,9 miliar sempat terjadi keterlambatan. Salah satunya Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) dikabarkan terjun langsung untuk audit proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sragen tahun 2014 tersebut, Senin (26/1).

Apalagi muncul rumor pencairan dana proyek tersebut diduga atas perintah Sekda Sragen. Bahkan dari hasil inpeksi mendadak (Sidak) Komisi IV DPRD Sragen, jaringan instalasi listrik juga belum selesai dikerjakan.

Sekretaris DKK Sragen, Hargiyanto mengakui adanya rencana kedatangan BPK untuk melakukan pemeriksaan pembangunan gedung DKK terse-



**Dijadwalkan
memang hari ini, (Senin
kemarin, red), tetapi hingga
siang kami tunggu tim
BPK belum juga datang**

Hargiyanto

Sekretaris DKK Sragen

but. "Dijadwalkan memang hari ini, (Senin kemarin, red), tetapi hingga siang kami tunggu tim BPK belum juga datang," jelas Hargiyanto.

Dijelaskan, sebenarnya tidak hanya BPK yang melakukan pemeriksaan, lantaran lebih dulu Itwil Provinsi Jateng juga telah mengecek proyek DKK secara langsung. Dari hasil pengecekan tersebut dinilai tak ada masalah baik secara fisik maupun administrasi. "Lantaran secara fisik memang tinggal jaringan

instalasi listrik yang belum selesai, namun secara umum tak mempengaruhi total pelaksanaan pengerjaan proyek," jelas Hargiyanto.

Begitu juga soal administrasi, kata Hargiyanto, denda keterlambatan pengerjaan proyek selama dua hari juga telah dibayarkan. Sedangkan munculnya rumor, soal pencairan dana proyek atas perintah pribadi Sekda Sragen tidak benar. "Lantaran semua keputusan maupun kebijakan diambil dari hasil rapat bersama. Selain itu perkembangan pengerjaan proyek setiap harinya juga dilaporkan sesuai tahapannya," tegas Hargiyanto.

Sebelumnya pengerjaan gedung DKK dapat sorotan aktivis LSM Sragen. Sebab berdasarkan Permenkes No 25/2012, bila proyek tak selesai pada batas akhir waktu, pengerjaan harus dihentikan. (ars/sus)